

RINGKASAN BERITA HARI INI



PARIWARA SEPUTAR KEGIATAN DPRD SIDOARJO

Ada Kespsekatan Baru, DPRD Sidarjo Fasilitas Mediasi Kebutuhan Kerjasama Parkir Antara Dishub dan PT ISS

DPRD Sidarjo menggelar rapat koordinasi dengan Dishub dan PT ISS untuk membahas kespsekatan baru terkait fasilitas mediasi kebutuhan kerjasama parkir. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sidarjo, M. Nur Hafid.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDOARJO

Wakil Rakyat Dukung Frontage Road

Delta Sari-Lingkar Timur Tuntas Maret

Wakil Rakyat DPRD Sidarjo mendukung pembangunan Frontage Road di kawasan Delta Sari-Lingkar Timur. Wakil Rakyat yang hadir dalam rapat koordinasi antara lain: M. Nur Hafid, M. Nur Hafid, M. Nur Hafid, dan M. Nur Hafid.

Wabup Minta Jalan Rusak Segera Diperbaiki

SIDOARJO - Sejumlah jalan di Kota Delta Sidarjo rusak parah akibat hujan deras yang mengguyur sejak sore kemarin. Wabup Sidarjo, M. Nur Hafid, meminta agar jalan-jalan tersebut segera diperbaiki.

Rizky Bakal Diobati sebelum Disekolahkan ke

SIDOARJO - Laporan mengenai adanya warga yang hidup dengan tangan terikat langsung ditindaklanjuti Wakil Bupati (Wabup) Sidarjo Subandi, Kemari (21/2) Subandi mengunjungi Rizky Ubahidillah, 19, warga Desa Beto. Sedati, yang tangannya diikat keluarga karena sering menyakit dan menakar diri sendiri.

Gus Muhdlor: Cegah Masalah Hukum, Pengelolaan Dana Desa Perlu Mendapatkan Pendampingan APH

KOTA-Jabatan kepala desa (kades) dinilai rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan. Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, Selasa (21/2).

Gus Muhdlor sapaan bupati mengatakan, kades perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah. Pengelolaan dana desa perlu mendapat pendampingan Aparat Penghak Hukum (APH). Hal itu penting diberikan agar dana desa yang digunakan tidak bermasalah. Sehingga tidak ada lagi Kades yang terjebak hukum terkait penggunaan dana desa.

"Kegiatan ini menjadi angin baru bagi perbaikan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Menurutnya, kesalahan administrasi menjadi salah satu faktor bermasalahnya penggunaan dana desa. Untuk itu edukasi melalui sosialisasi seperti ini penting dilakukan. Apalagi saat ini dana desa yang diterima Kabupaten Sidoarjo cukup besar. Jumlahnya Rp 315 miliar yang dibagikan kepada 322 desa yang tersebar di Sidoarjo.

SOSIALISASI ALISASI PERAN, TUGAS, DAN FUNGSI LAM PENGAWAS PENGELOLAAN



Bupati Sidoarjo Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Gubernur Jatim

Sidoarjo, Memo X Menyjangkakan Ramadan dan Idul Fitri 2023, Pemprov Jatim menggelar High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Gubernur dan Forkopinda Jawa Timur, di Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (20/02/2023). Salah satu yang menjadi perhatian dalam Rakor yang dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali adalah pengendalian inflasi. Terutama soal masalah ketersediaan pangan khususnya beras di pasaran.

Rapat ini dihadiri seluruh Forkopinda Jatim, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, serta kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, juga dari unsur TNI dan POLRI. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Kemungkinan harga beras belakangan ini terjadi menjadi salah satu penyebab inflasi di Jatim," ujar Gubernur Jatim, Khofifah

Pemkab Sidoarjo Petakan Wilayah Banjir 3 Kecamatan

Pemkab Sidoarjo memetakan wilayah banjir di tiga kecamatan setempat untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Senin (20/1), mengatakan, dirinya bersama dengan pejabat setempat melakukan pemetaan terkait wilayah banjir.

"Wilayah yang tergenang banjir ada di Kecamatan Tangulgan, yaitu di Desa Kedung Barung, Banjar Asri, Banjar Panji, Kaldawir dan Boro. Di Kecamatan Porong meliputi Desa Sawah, Candi Pari dan Wunut, sementara di Kecamatan Candi ada Desa Sumorame," katanya usai meninjau wilayah banjir di tiga kecamatan tersebut.

Kades Diberi Pendampingan Kelola Dana Desa

Gus Muhdlor: Rentan Masalah Hukum

SIDOARJO - Edukasi dan pendampingan kepala desa (kades) sangat penting untuk mencegah masalah hukum dalam pengelolaan dana desa. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, kades perlu mendapat pendampingan dari Aparat Penghak Hukum (APH).

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (tiga kiri) bersama dengan pejabat setempat meninjau lokasi banjir.

Pemkab Sidoarjo Petakan Wilayah Banjir 3 Kecamatan

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (tiga kiri) bersama dengan pejabat setempat meninjau lokasi banjir.

SMAN 1 Sidoarjo Borong Tiga Penghargaan AISEF

SIDOARJO - Berita cemerlang tentang tiga SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) Sidoarjo yang meraih penghargaan AISEF (ASEAN Inclusive and Sustainable Education Award) 2022. Tiga SMAN tersebut adalah SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 3.

Upgrade SDM Melalui Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan

GANDU - Tiga pagelaran pelatihan akuntansi dan perpajakan digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUM) Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan SDM di bidang akuntansi dan perpajakan.

Selain Gelap Gulita, Jalan Tanjapwag-Mojoruntut Rusak Parah

Banyak Pengendara Terhempas, Jalan Rusak di Desak Kureksari

SIDOARJO - Kondisi jalan rusak parah di Desa Tanjapwag, Kecamatan Mojoruntut, Kabupaten Sidoarjo, menyebabkan banyak pengendara terhempas. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan jalan tersebut.

Sebanyak 25 Sekolah Swasta Terima Hibah dari Kukud Sidoarjo

Sidoarjo, Hibana - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah menyerahkan hibah kepada 25 sekolah swasta. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.

YPIT Insan Kamil Adakan Festival Ecobrick

IGYTA-Memperingati hari peduli lingkungan, YPIT (Yayasan Pemuda Indonesia) Insan Kamil mengadakan Festival Ecobrick. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang sampah plastik.

Upgrade SDM Melalui Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan

Sebanyak 25 Sekolah Swasta Terima Hibah dari Kukud Sidoarjo

YPIT Insan Kamil Adakan Festival Ecobrick



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dewan Sayangkan Stok Terbatas, Operasi Pasar Beras Murah Bermasalah

21 Februari 2023



(Kanan) H. Bambang Pujiyanto Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo dari Fraksi Gerindra. (daryanto/duta masyarakat)



SIDOARJO | duta.co – Operasi pasar murah yang digelar Bulog sudah di sosialisasikan Pemerintahan Desa (Pemdes) ke warga di 18 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Setiap warga di jatah 10 kilogram 2 kemasan.

Harga beras murah program pemerintah pusat itu Rp 8.600/kg. Murahnya harga beras itu mendapat antusias dari warga. Banyak warga yang mendaftar ke Pemdes masing-masing. Di wilayah Kecamatan Wonoayu, uang beras murah dari warga yang mendaftar dengan menyetorkan 2 lembar foto copy KTP dan KK (Kartu Keluarga) ke Pemdes akan di setorkan ke Bagian Seksi Perekonomian Kantor Kecamatan Wonoayu tanggal Kamis (23/2).

Namun informasinya, Selasa (21/2), dari jumlah 23 Desa di Kecamatan Wonoayu, terakomodir hanya 5 desa. Untuk warga 18 desa lainnya bakal gigit warga tidak akan menikmati beras murah Bulog.

Karut marutnya program beras murah di Wilayah Wonoayu ini sudah terdengar oleh pimpinan Kecamatan Wonoayu untuk dilakukan pembahasan yang serius sebelum warga bergolak. Peralnya





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pesan Bupati Sidoarjo Dihadapan BPK dan DPR, Kades Harus Diberi Pendampingan Kelola Dana Desa



By [Djavatimes](#) ✓

21 Februari 2023, 16:51



Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor saat memberikan sambutan pada sosialisasi peran tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan dana desa



SIDOARJO, DJAVATIMES -- Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP atau Gus Muhdlor mengatakan jabatan Kepala Desa/Kades rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan. Hal itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa di hotel Aston Sidoarjo, Selasa (21/2/2023).

Oleh karenanya lanjut Gus Muhdlor, Kades perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah. Pengelolaan dana desa perlu mendapatkan pendampingan Aparat Penegak Hukum/APH. Hal itu penting diberikan agar dana desa yang digunakan tidak bermasalah. Sehingga tidak ada lagi Kades yang terjerat hukum terkait penggunaan dana desa.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SATPAM DI SIDOARJO GEMBIRA BISA BERANGKAT HAJI

Lunas Tahun 2020, Tidak Perlu Menambah Ongkos Haji Lagi

Sidoarjo, Pokok Kiri

Seorang satpam yang berdinis di salah satu perumahan di Gedangan, Sidoarjo, gembira dan bersyukur, akhirnya bisa berangkat ibadah haji. Uang gaji sedikit demi sedikit dia kumpulkan untuk niat haji bersama istrinya. Hal ini diungkapkan oleh M Sholeh (49) warga Karangbong RT 06 RW 02 Gedangan, Sidoarjo. Sholeh yang kesehariannya bekerja sebagai satpam sejak tahun 2003 silam, menjadi salah satu tenaga keamanan di salah satu perumahan di Gedangan, Sidoarjo. Menurut Sholeh, dirinya telah mendaftar sejak tahun 2011 silam, atau hampir 12 tahun menunggu, niat haji Sholeh bersama

istri akhirnya bisa terwujud di tahun 2023 ini. Sempat tertunda keberangkatannya di tahun 2020 lalu karena pandemi, akhirnya sholeh bersyukur dan meneteskan air mata, akhirnya rukun islam kelima segera akan dijalannya. "Alhamdulillah mas akhirnya doa saya terkabul, saya memberikan seluruh gaji setiap bulannya untuk diserahkan ke istri saya. Uang separuh untuk keperluan rumah tangga dan sisanya ditabung untuk membayar pelunasan haji untuk dua orang," jelas M Sholeh. Dirinya juga mengaku dengan hidup sederhana dan tak lupa selalu berdoa dan sedekah akhirnya bisa melunasi pembayaran haji di tahun 2020



kemarin, dan tahun ini 2023 berangkat. "Saya menjadi calon jamaah haji ini tak perlu

menambah ongkos haji yang telah ditetapkan pemerintah dan dpr sebesar 49,8 juta

rupiah, karena uang tabungan saya lebih dari cukup," pungkasnya. (edy)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

MODUS PUNGLI, OKNUM PERANGKAT DESA SIDOKEPUNG DIDUGA ARAHKAN WARGA GUNAKAN NOTARIS DALAM PROSES PTSL

Sidoarjo, Pojok Kiri

Direktur Java Corruption watch [JCW], Sigit Imam Basuki menyorot adanya dugaan praktek-praktek Pungli dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap [PTSL] di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Temuan [JCW] ini berdasarkan laporan warga yang mengaku dipersulit ketika akan mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pendaftaran PTSL.

"Kita ini bergerak berdasarkan bukti-bukti dan laporan warga yang mengaku dalam proses penguasaan [PTSL] diwajibkan ke Notaris," Ungkapnya saat dikonfirmasi awak media Senin 20 Februari 2023.

Sigit menegaskan awal mula Pemerintah Pusat mengadakan program sertifikat murah dengan nama PTSL agar masyarakat yang Ekonomi bawah bisa mendaftar dengan biaya pengurusan terbilang murah dan terjangkau untuk mendapatkan sertifikat.

"Pemerintah melalui

BPN seringkali mensosialisasikan bahwa biaya PTSL hanya Rp.150 ribu tidak lebih dari itu, jika ada biaya lain-lainnya di luar seratus lima puluh ribu bisa dipastikan itu Pungli. Sudah ada contohnya yakni di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kades dan Perangkat di jebloskan di balik jeruji oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo." Ungkapnya.

Jika seorang Kades tidak bersedia membantu dan memperlancar program Pemerintah, ini patut kita curigai.

"Proses Hibah dan Waris, cukup tandatangan Kepala Desa. Kenapa harus ke Notaris, kasihan warga dipersulit. Apalagi saya dengar awalnya Notaris yang di tunjuk Desa hanya Notaris yang kerjasama dengan Desa," Lanjut Sigit.

Ditempat terpisah Koko [bukan nama sebenarnya] warga Desa Sidokepong mengaku yang mengarahkan untuk ke Notaris adalah Pak Carik [Sekertaris Desa].

"Pak Carik Samsul menyarankan ke Notaris saat saya hendak mengurus



Pendaftaran PTSL di desa Sidokepong

Waris. Padahal dalam sosialisasi pihak BPN di Balai Desa Sidokepong juga berdasarkan kesaksian tetangga desa yang lebih dulu mengurus PTSL tidak perlu ke Notaris. Jika ke Notaris biayanya pasti lebih dari Rp 2 juta rupiah," Ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Bu Aminah [bukan nama sebenarnya] mengaku juga diarahkan ke Notaris untuk melengkapi proses pemberkasan pendaftaran PTSL.

"Ketika berkas diperiksa oleh petugas Panitia PTSL Desa dan dinyatakan sudah

lengkap. Hanya satu berkas saja kemudian oleh panitia diarahkan ke Pak Carik. Lalu disarankan ke Notaris pilihan Desa namun boleh juga menggunakan Notaris diluar atau bukan yang kerjasama dengan Desa," Jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media Notaris yang ditunjuk oleh Desa alamatnya berlokasi di daerah Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Infonya, Sementara Camat Buduran, Syamsu Rizal saat dikonfirmasi wartawan terkait PTSL desa Sidokepong

yang diduga lakukan Pungli dengan modus jasa notaris, Camat Katakan untuk PTSL Rp 150.000 itu sudah bisa jadi sertifikat gak boleh ada biaya tambahan, Katanya, Selasa 21/2/23. Sedang Sigit Imam Basuki ST menandakan pada wartawan, Selasa, 21/2/23, dia akan Pulbaket dan Puldata dan jika nanti kalau sudah ada dua alat bukti yang mendukung tindak pidana korupsi pada PTSL Sidokepong, ia akan laporkan secara resmi ke Kejaksaan Sidoarjo maupun ke Polresta Sidoarjo (Khol/ Joe/ Bersambung)



JALAN RUSAK: Kondisi jalan rusak di perbatasan Desa Mojoruntut dan Desa Tanjekwagir.(gus)

Selain Gelap Gulita, Jalan Tanjekwagir-Mojoruntut Rusak Parah

Sidoarjo, Memo X

Jalan yang menghubungkan Desa Tanjekwagir dan Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung rusak parah. Kondisi jalan terlihat batu dan makadam. Di lokasi juga minim Penerangan Jalan Umum (PJU). Sehingga ketika melintas di malam hari gelap gulita dan hanya mengandalkan peneranga lampu kendaraan.

Parkan (58), warga setempat mengatakan, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan cukup lama dan tidak ada perbaikan. Mengantisipasi kecelakaan maka petani beserta warga melakukan pengurukan dengan material seadanya seperti pecahan batu bata.

Warga kasihan kepada pengedara khususnya pemotor yang melintasi malam hari apalagi di musim hujan ini. Dipastikan mereka terjebak lubang yang digenangi air. Agar tidak menimbulkan korban kecelakaan, terpaksa dilakukan pengurukan apa adanya.

"Malam hari jalan ini kondisinya gelap gulita, tidak ada penerangan lampu jalan. Kami berharap kepada instansi terkait, untuk merealisasikannya pengguna jalan, petani merasa nyaman dan aman," ungkapnya, Selasa (21/02/2023) kemarin siang.

Sementara Kepala Desa Mojoruntut melalui Salis Sujatniko Sekretaris Desa menjelaskan, persoalan jalan yang rusak itu, berbatasan langsung dengan Desa Tanjekwagir. Kerusakanya cukup lama, hampir 10 tahun yang lalu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bahkan di sepanjang jalan tersebut, tidak ada lampu PJU. "Pemerintah Desa melakukan terobosan dengan mengajukan proposal pengadaan lampu," pungkasnya. (gus/ono)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FIRMA ZUHDI/JAWA POS

TOROHKAN PRESTASI: Tim karya ilmiah SMAN 1 Sidoarjo memamerkan piala hasil kompetisi AISEEF di sekolah mereka kemarin (21/2).

SMAN 1 Sidoarjo Borong Tiga Penghargaan AISEEF

SIDOARJO - Berkat *cookies* penghilang stres dan *snack* atasi diabetes, tim karya ilmiah SMAN 1 Sidoarjo berhasil memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair (AISEEF) yang berlangsung sejak Januari hingga pemenang diumumkan 14 Februari lalu.

SMAN 1 Sidoarjo mengirim dua tim untuk mengikuti AISEEF. Masing-masing terdiri atas lima siswa. Tim pertama membuat inovasi *snack bar* dari ikan gabus untuk mengatasi luka diabetes melitus (DM) tipe II. Ikan gabus diambil dagingnya, lalu dihaluskan. Adonan ikan gabus dicampur dengan *oat*, lalu dicetak batangan dan dioven hingga jadi *snack bar*.

"Ikan gabus bisa jadi pencegah diabetes karena banyak kandungan albuminnya," kata Amelia Angelina Ramadhini, salah seorang pencetus ide inovasi tersebut.

Inovasi itu pada 14 Februari lalu berhasil menyabet *gold medal* dan *special award* dari Malaysia Young Scientist Organization (MYSO). Nah, MYSO merupakan salah satu partner AISEEF.

Tim kedua tak kalah menarik. Mereka membuat *cookies* untuk mengurangi stres. Kue tersebut terbuat dari bahan utama daun kelor dan anggur laut atau *Caulerpa*.

"Kalau kebanyakan, hormon kortisol ini bisa meningkatkan stres. Nah, kelor ini efektif menekan hormon kortisol," jelas Carissa. Ditambah, kandungan magnesium pada *Caulerpa* juga baik untuk mengontrol hormon kortisol. "Dipadukan, bisa jadi pereda stres," katanya. Berkat inovasi itu, timnya mendapat *silver medal* dalam AISEEF. (uzi/c12/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

YPIT Insan Kamil Adakan Festival Ecobrick

JKOTA-Memperingati hari peduli sampah nasional, YPIT Insan Kamil mengadakan festival ecobrick. Kegiatan yang diikuti oleh 1.000 siswa KB/RA, SIDT, dan SMPIT itu berlangsung Selasa (21/2). Festival tersebut merupakan aksi nyata menyelamatkan bumi dengan membuat ecobrick secara serentak.

Ketua Panitia Festival Ecobrick Noora Variant Tanagalie, M.Pd mengatakan, aksi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan sisa konsumsi berupa plastik yang tidak mudah terurai. "Dengan banyaknya plastik yang dimasukkan ke

dalam botol membuat lingkungan lebih bersih," katanya.

Dia berharap tidak sekedar seremoni, tetapi juga bisa menjadi gaya hidup yang berkelanjutan. Siswa diharapkan mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan dan bertanggung jawab terhadap sampahnya.

Mereka juga membawa misi tersebut ke keluarga dan lingkungan di rumah. Sehingga jika semuanya bisa menerapkan hal yang sama, maka tumpukan sampah yang tidak terurai bisa berkurang.

PJ Zero Waste SMPIT Insan Kamil Shinta Dewi Anggraini mengatakan, pihaknya priha-

tin terhadap tumpukan sampah yang saat ini sudah overload. Menurut dia, hal itu bisa membahayakan masyarakat. "Untuk itu harus segera ada solusi agar tidak menumpuk sampah di TPA," ujarnya.

Kegiatan festival ecobrick juga dilaksanakan untuk mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah. Menyampaikan edukasi ke anak-anak untuk mengelola sampah agar tidak dibuang ke TPA.

Sampah plastik seharusnya bisa dimanfaatkan untuk dikreasikan menjadi bentuk lain yang bermanfaat. (nis/vga)



KOMPAK: Siswa KB/RA-SDIT-SMPIT Insan Kamil Sidoarjo saat memasukan plastik ke dalam botol, mengikuti kegiatan Festival Ecobrick.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sebanyak 25 Sekolah Swasta Terima Hibah dari Dikbud Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidoarjo tahun 2023 ini menyalurkan bantuan hibah untuk sejumlah sekolah swasta.

Untuk tingkat MI/SD swasta ada sebanyak 13 sekolah dan untuk MTs/SMP swasta ada sebanyak 12 sekolah.

Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Sarana dan Prasarana Dikbud Kab Sidoarjo, Heri Purwanto ST, mengatakan bantuan hibah itu ada yang berbentuk Sarpras belajar mengajar, juga ada bantuan hibah untuk rehabilitasi ruang kelas baru.

"Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah masing-masing," jelas Heri, Selasa (21/2) kemarin, di aula Kantor Dikbud Sidoarjo, saat mengundang para Kepala Sekolah yang bersangkutan, untuk diberikan sosialisasinya.

Sesuai datanya, untuk MI/SD swasta rinciannya 12 untuk jenis MI dan 1 untuk SD swasta. Bantuan hibah untuk jenis sekolah ini selain Sarpras

juga ada rehabilitasi ruang kelas baru.

Sekolahan ini berada di kawasan wilayah Kec Candi, Gedangan, Krembung, Prambon, Taman, Porong, Wonoayu dan Kec Tarik.

Sedangkan untuk MTs/SMP Swasta rinciannya 3 MTs dan 9 SMP swasta. Bantuan hibah untuk jenis sekola-

han ini selain sarpras seperti mebel, computer, praktek Lab IPA, juga ada rehab kelas, kamar mandi dan WC.

Sekolahan ini berada di kawasan wilayah Kec Candi, Tarik, Krembung, Tulangan, Jabon, Sidoarjo dan Krian.

Bantuan hibah tersebut, kata Heri, sudah diusulkan oleh pihak sekolah

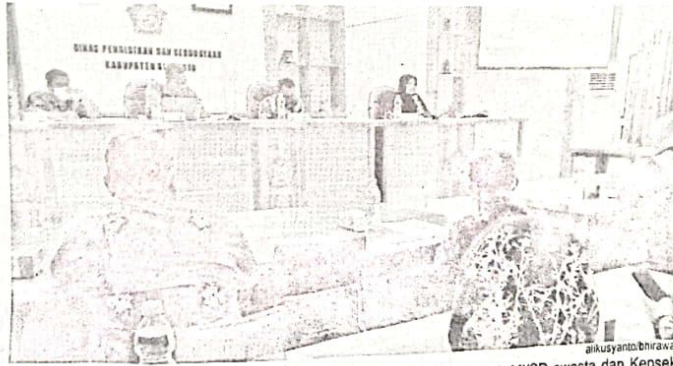
yang bersangkutan pada tahun 2022 lalu. Besaran nilai bantuan hibah ini, tiap sekolah berbeda-beda, tergantung pada kondisi yang diusulkan.

Heri mengingatkan supaya pihak sekolah penerima bantuan hibah tersebut, tidak sampai telat dalam membuat laporan pertanggung jawabannya.

Auditor Inspektorat Kab Sidoarjo, Susi Rohmawati SE MM, yang hadir dalam sosialisasi tersebut juga menambahkan agar pihak sekolah sebagai pihak penerima bantuan hibah, hati-hati dalam membuat laporan pertanggung jawaban.

"Jangan asal membuat laporan, tetapi harus akuntabel dan jangan sampai fiktif," katanya mengingatkan.

Dirinya menyebut, sejumlah kasus temuan di lapangan saat dijumpai saat monitoring, diantaranya adalah banyak pendukung laporan yang tidak lengkap, batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban yang tidak tepat jadwal, dan bukti fisik tidak sesuai dengan rencana semula. [kus.why]



Dikbud Kab Sidoarjo, Selasa (21/2) kemarin, mengundang para Kepsek MI/SD swasta dan Kepsek MTs/SMP swasta, sosialisasi belanja hibah tahun 2023.

BERITA
Bhirawa
Buku Sajat Bhirawa



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rizky Bakal Diobati sebelum Disekolahkan ke SLB



DIMAS MAULANA/JAWA POS
SEGERA DITANGANI: Tangan Rizky Ubaidillah, 19, yang diikat orang tuanya. Kemarin (21/2) Wabup Subandi menemuinya di kediamannya di Sedati.

SIDOARJO - Laporan mengenai adanya warga yang hidup dengan tangan terikat langsung ditindaklanjuti Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi. Kemarin (21/2) Subandi mengunjungi Rizky Ubaidillah, 19, warga Desa Betro, Sedati, yang tangannya diikat keluarga karena sering memukul dan mencakar dirinya sendiri.

Saat ditemui, Rizky duduk bersama ibunya, Mufida, 41. Ayahnya, Aryadi, 49, tengah menggendong adiknya yang masih berumur 4 tahun.

Nenek Rizky, Siti Romlah, menjelaskan, saat menginjak usia

5 tahun, Rizky tiba-tiba memiliki gelagat aneh sering memukul dan mencakar dirinya sendiri hingga berdarah. "Akhirnya, untuk mencegah, terpaksa kami ikat tangannya. Untuk makan dan minum, semua *disuapin*," ujar perempuan 60 tahun tersebut.

Pihak keluarga belum pernah memeriksakan Rizky ke dokter akibat keterbatasan biaya. "Ada yang bilang ada gangguan saraf. Makanya, kakinya gak bisa buat jalan. Ada juga yang bilang ini gangguan mental. Saya juga tidak tahu pasti," katanya.

Mulai umur 5 tahun, Rizky tidak pernah merasakan sekolah akibat kelainan yang dideritanya. Dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

Wabup Subandi menyatakan bahwa dirinya sudah menghubungi kepala dinas kesehatan (Kadinkes) agar Rizky mendapatkan bantuan kesehatan.

Selain itu, Subandi menawarkan agar Rizky bersekolah di SLB untuk bisa mengenyam pendidikan. "Jika kondisinya membaik, insya Allah akan kami bantu untuk masuk ke SLB," tuturnya. (eza/c14/any)

Jawa Pos

Wabup Minta Jalan Rusak Segera Diperbaiki

SIDOARJO - Sejumlah jalan di Kota Delta terpantau masih ada yang rusak (*lihat grafis*). Meski, di sejumlah titik perbaikan mulai dilakukan. Penyebabnya beragam. Mulai tergerus air hujan, fondasi jalannya ambles, hingga kerap dilewati kendaraan berat.

Kemarin (21/2) siang Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menggelar sidak di Jalan Kolonel Sugiono, Desa Kureksari, Kecamatan Waru. Subandi memastikan jalan tersebut segera diperbaiki. Apalagi, jalan itu kerap memakan korban. Banyak pengendara yang terjatuh. Pihaknya meminta genangan di jalan tersebut disodot dulu. "Fokus saat ini, airnya disodot dulu. Setelah itu, baru bisa diuruk dan diperbaiki," kata Subandi.

Setelah diuruk, jalan dipadatkan agar fondasinya keras. Setelah itu, diaspal ulang. Dia meminta dinas terkait segera turun untuk menangani langsung kemarin. "Sore ini (kemarin, Red) harus mulai diuruk," ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, fondasi jalan tergerus sehingga menimbulkan cekungan.



MAKAN BANYAK KORBAN: Wishom Sahudi, kepala Desa Kureksari, Kecamatan Waru, melintas di Jalan Kolonel Sugiono yang rusak dan terendam air kemarin (21/2). Wabup meminta jalan tersebut segera diperbaiki.

Karena itu, jalan tersebut tergenang saathujan. Genangan air merusak aspal. Akibatnya, jalan penuh lubang.

"Jalannya mengalami cekungan dengan panjang sekitar 55 meter. Ini kami uruk dulu," kata Dwi. Hari ini (22/2) pematatan jalan dilakukan. "Dipadatkan beberapa kali dulu. Setelah itu diaspal," ujarnya.

Dwi menuturkan, saat pengurukan, jalan tersebut bakal ditutup sementara. Namun, saat pematatan, jalan sudah bisa diakses. Pengurukan

hanya butuh waktu beberapa jam.

Dwi mengatakan, untuk ruas jalan lain juga mulai proses perbaikan. Jalan Damarsi sudah tuntas diperbaiki. Jalan Doro Banjarsari saat ini sedang diuruk. Dwi menyebut kemarin pihaknya sudah menggelar rapat dengan pelaksana penggalian jaringan pipa sistem penyediaan air minum (SPAM) maupun pengembang yang izin menggunakan jalan sebagai akses menuju lokasi urukan mereka. (*uzi/c7/any*)

JALAN RUSAK DI KOTA DELTA

- 1 Jl Kolonel Sugiono, Desa Kureksari, Waru
- 2 Jl Raya Keling, Jumputrejo, Sukodono
- 3 Jl Doro Banjarsari, Buduran
- 4 Jl KH Ali Mas'ud, Buduran
- 5 Jl Raya Sukodono
- 6 Jl Lingkar Timur Sidoarjo
- 7 Jl Raya Bangsri, Sukodono
- 8 Jl Aryo Bebahang, Gedangan
- 9 Jl Sampang Bromo, Desa Mojoruntut, Krembung
- 10 Jl Wadungasri, Waru

GRAFIS: BGUA, JAWA POS

Jawa Pos



Wabup Sidoarjo H Subandi SH saat Sidak desa langganan banjir di kecamatan Candi dan Tanggulangin

WABUP SUBANDI SIDAK DESA LANGGANAN BANJIR KECAMATAN CANDI

Sidoarjo, Pojok Kiri

Hujan yang mengguyur serta naiknya air laut (rob), mengakibatkan sejumlah wilayah di Kabupaten Sidoarjo tergenang banjir. Banjir yang menggenang di Sidoarjo, terjadi di sejumlah desa di tiga kecamatan. Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi SH melakukan Sidak banjir di beberapa desa di wilayah Kecamatan Candi. Beberapa desa yang didatangi Wakil Bupati (Wabup) memang kerap kebanjiran, Senin (20/2/23).

Didampingi Kepala Dinas Sosial Misbahul Munir, Kepala BPBD Sido-

arjo Dwijo Prawito, Dinas PUBMSDA dan Camat Candi, Kepala Desa Sumorame dan Kepala Desa Boro, rombongan meninjau penyebab kerapnya banjir di wilayah tersebut.

Wabup H. Subandi mengatakan bahwa wilayah yang tergenang banjir ada di Kecamatan Tanggulangin, yaitu di Desa Kedung Banteng, Banjar Asri, Banjar Panji, Kalidawir dan Boro. Di Kecamatan Porong meliputi Desa Sawahan, Candi Pari dan Wunut, sementara di Kecamatan Candi ada Desa Sumorame.

"Khusus wilayah Desa

Boro dan Sumorame, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah banjir hingga air masuk pemukiman. Banjir di dua desa ini akibat air sungai meluap, dampak dari hujan dan naiknya air laut," katanya.

Sementara di wilayah desa lainnya, banjir terjadi akibat hujan tinggi. Wilayah-wilayah tersebut sudah menjadi langganan banjir karena lokasi yang rendah.

Dari hasil Sidak di titik langganan banjir yang ada di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, H. Subandi menerangkan bahwa

pihaknya akan melakukan kajian terkait banjir yang merendam Sidoarjo bersama OPD terkait.

"Banjir yang datang di setiap musim hujan tersebut menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi komplain masyarakat, pengukuran kembali jalan raya yang terendam banjir menjadi salah satu solusi sementara, selain itu normalisasi sungai di setiap desa yang menjadi langganan banjir juga perlu dilakukan pemerintah terkait P

Penanggulangan banjir di kota Delta," ungkap H.

Subandi.

Sementara itu, Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito menyebut bahwa dari tiga kecamatan yang ada di Sidoarjo setidaknya ada delapan desa yang menjadi langganan dan terendam banjir.

"Daerah yang terendam dan menjadi langganan banjir nantinya akan dilakukan pendataan kepada warga yang terdampak, tak hanya itu penanganan terkait sanitasi dan lain sebagainya juga tetap diberikan untuk warga yang masuk dalam kawasan terdampak," pungkasnya. (Khol/ Fs)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LINTAS PELAYANAN

Nilai Indeks Pelayanan Publik di Sidoarjo Ditarget Minimal B

Sidoarjo, Bhirawa

Nilai indeks pelayanan publik (IPP) dari kinerja OPD di Kab Sidoarjo pada tahun 2023 ini ditarget bisa mencapai minimal B atau dengan score 3.51 - 4.00. Analis Kebijakan Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa SSTP, MAP, mengatakan semakin tinggi score IPP yang diraih, kinerja layanan publik di lembaga OPD akan semakin baik. "IPP ini untuk mengukur kinerja pelayanan publik dilingkungan lembaga Pemerintah. IPP ini diatur dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2017," kata Inggit, Selasa (21/2) kemarin.

Jumlah lokus yang dipantau, didampingi dan dievaluasi dalam pelayanan publik, di Pemkab Sidoarjo mulai tahun 2021 lalu hingga 2022, kata Inggit, sudah ada sebanyak 103 lokus. Pada tahun 2023 ini, ada penambahan 7 lokus baru. Tentu saja harapannya, agar semakin banyak kinerja OPD di Pemkab Sidoarjo yang berkualitas dalam memberikan layanannya kepada publik.

Sebanyak 7 lokus baru tersebut di antaranya dari BUMD ada nama BPR Delta Artha, PDAM Delta Tirta dan Aneka Usaha. Dari Puskesmas, nama dari puskesmas baru seperti Puskesmas Wonokasian, Tambakrejo dan Tarik 2. Dan dari RSUD, ada nama dari RSUD Sidoarjo barat.

Tujuh lokus baru ini, menurut Inggit perlu mendapat pendampingan intensif, agar ritme kinerja mereka bisa menyamai dengan 103 lokus yang sudah ada sebelumnya. Namun dirinya akan memaklumi, kalau pada awal-awal, kinerja dari 7 lokus ini pasti akan menghadapi sejumlah rintangan dan kendala. "Tetapi mereka harus bisa dan berusaha. Karena dalam pemantauan evaluasi kinerja ini, ada 6 aspek yang wajib untuk bisa dilakukan oleh mereka. Karena 6 aspek ini akan dinilai," kata Inggit.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun 12 Ribu Sambungan Rumah di Lima Kecamatan



TAMBAH SAMBUNGAN: Distribution Center (DC) Perumda Delta Tirta Sidoarjo yang ada di Kecamatan Jabon.

KOTA-Penyerasan air Umbulan untuk kebutuhan air bersih di Sidoarjo mendapatkan dukungan dari pemkab. Berupa pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PPCKTR). Tahun ini pembangunannya menasar lima kecamatan.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PPCKTR Sidoarjo Slamet Budiarto menyebutkan, lima kecamatan tersebut adalah Jabon, Porong, Candi, Gedangan dan Sedati. Diakukannya, pembangunan SPAM Umbulan memang diprioritaskan di wilayah yang sudah ada Distribution Center (DC)-nya.

Menurut dia, pembangunan SPAM Umbulan tahun ini sebagai upaya untuk memenuhi target penyerapan debit air Umbulan. Pembangunan di lima kecamatan tersebut akan mengakomodir sekitar 12 ribu sambungan rumah. "Target tahun ini ada 12 ribu sambungan rumah baru," katanya.

Budi menyebutkan, saat ini progres pembangunan itu masih dalam tahap persiapan. Pihaknya sedang melelang jasa konsultan manajemen pembangunan SPAM Umbulan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 3,5 miliar.

Selanjutnya, pembangunan SPAM Umbulan akan dilaksanakan secara bertahap. "Targetnya sebelum akhir tahun

tuntas dan sudah bisa teraliri," imbuhnya.

Budi menjelaskan, pembangunan SPAM ditujukan untuk merupakan tanggung jawab memenuhi hak masyarakat atas akses terhadap air bersih. Untuk itu, setiap tahun selalu dilakukan pembangunan. Namun jumlahnya beragam, sesuai dengan rencana kerja.

Tahun ini, target penyerapan air Umbulan Perumda Delta Tirta sebanyak 720 liter per second (lps). Untuk bisa memenuhi target tersebut, selain pembangunan SPAM dari pemkab juga ada bantuan dari pemerintah pusat dan dari Delta Tirta sendiri. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Banyak Pengendara Terjatuh, Jalan Rusak di Desa Kureksari Bakal Diaspal

WARU-Jalan sepanjang sekitar 150 meter di Jalan Kolonel Sugiono, Desa Kureksari, Kecamatan Waru rusak. Kerusakan tersebut tak hanya membuat pengendara kesulitan melintas, tetapi juga membuat pengendara kerap terjatuh hingga patah tulang. Penyebabnya, jalan tersebut

berlubang dan bergelombang. Saat hujan, lubang jalan tertutup genangan. Sehingga banyak pengendara tak melihat lubang. Warga pun menandainya dengan ban bekas agar pengendara berhati-hati. "Kemarin itu ada suami istri pakai motor matik. Nah, mereka kan enggak tahu. Saat melintas

mereka terbalik. Kakinya terluka parah. Motornya sampai saat ini ditinggal karena orangnya dibawa ke klinik," ujar Agus, warga sekitar. Kejadian itu membuat Wakil Bupati Sidoarjo Subandi prihatin. Dia lalu meninjau langsung kerusakan jalan tersebut, Selasa (2/2) pagi.

MEMBAHAYAKAN: Genangan air di jalan berlubang Desa Kureksari, Kecamatan Waru saat akan disedot oleh BPBD Jatim.

● Ke Halaman 10



Banyak Pengendara Terjatuh,...

Subandi melihat langsung kondisi jalan. Dia kemudian meminta agar genangan disedot. Tak lama bantuan dari BPBD Jatim tiba. Petugas langsung menyedot genangan air yang merendam lubang-lubang jalan yang

...Membuat Banyak Masalah



cukup dalam itu. "Airnya kita buang dulu agar surut," katanya.

Tak hanya itu, Subandi kemudian memberi bantuan dua truk berisi pasir batu. Setelah itu jalan tersebut akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPUBM SDA). "Insya Allah besok (hari ini, Red) sudah ada penanganan," imbuhnya.

Subandi juga memerintahkan agar jalan tersebut dihotmix (aspal). Dia meminta agar proses tersebut selesai tiga hingga empat bulan ke depan. Pihaknya juga mengupayakan betonisasi. Sebab di sekitar lokasi, banyak home industri.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat jalan harus dibetonisasi. Tak hanya itu, jika ada bangunan berdiri liar di

tanah irigasi, maka nkan segera diselesaikan. "Biarkan itu nanti orang yang lewat enak dan nyaman," terangnya.

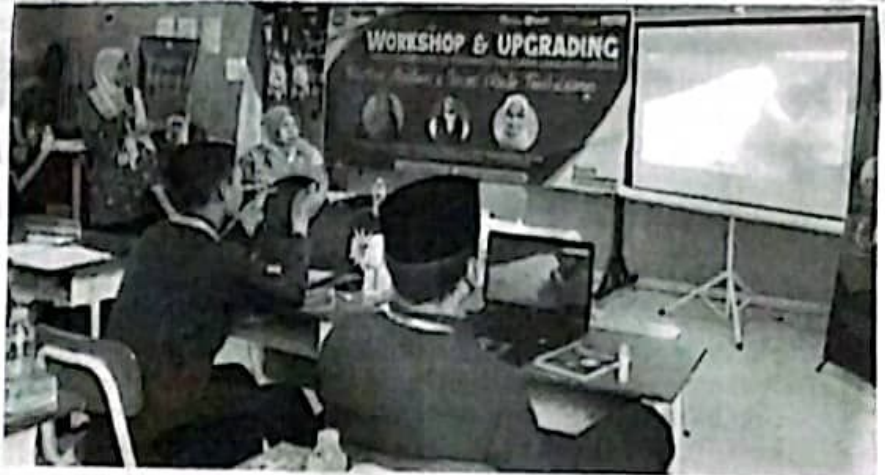
Camat Waru Nawari mengatakan, sejatinya Pemkab Sidoarjo sudah merencanakan perbaikan. Namun begitu, prosesnya masih membutuhkan waktu. Dia membenarkan banyak pengendara yang jatuh. Beruntung, tindakan langsung dilakukan. (far/vga)

Upgrade SDM Melalui Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan

CANDI-Tim pengabdian masyarakat (abdimas) yang merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Riset MU Batch VI yang mengadakan pelatihan upgrading Sumber Daya Manusia (SDM) di SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool, Selasa (21/2). Pelatihan yang diberikan mengenai keuangan dan perpajakan. Sasarannya adalah guru, bendahara, dan bagian Tata Usaha (TU).

Ketua Tim Abdimas Duwi Rahayu mengatakan, setelah mendapatkan pelatihan, guru diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan mereka terkait keuangan dan perpanjangan. Dia menyebut, pelatihan itu sebagai bentuk feedback dari Umsida untuk SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool.

Diharapkan adanya pelatihan tersebut bisa membuat keuangan dan pembayaran pajak tersistem. "Ketika semuanya tersistem, tentu akan lebih baik," katanya.



PAPARAN: Dosen Duwi Rahayu, SE., MA Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saat memberikan pelatihan kepada guru dan karyawan SD Muhammadiyah 1 Candi Labschool.

Menurut Duwi, dengan adanya pelatihan tersebut bisa menguatkan sistem yang saat ini sudah berjalan di sekolah. Sehingga menambah profesionalitas kerja. Sebab dalam setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dengan baik.

Tidak hanya memberikan pelatihan, Duwi menyebut pihaknya juga akan memberikan tindak lanjut. Berupa pendam-

pingan ketika sistem dijalankan. "Kami akan membantu dalam setiap prosesnya," ujarnya.

Duwi mengatakan, dalam pelatihan tersebut dia tidak sendiri. Ada anggota tim Dina Dwi Oktavia Rini., SE., MSA., CTA, ACPA. Serta dibantu oleh mahasiswa Alliyah Ayu, Syifa'ul Qolbi, Kansha Amelinda, Neila Martha, Nurul Khusnul Khotimah. (nls/vga)

Bupati Sidoarjo Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Gubernur Jatim

Sidoarjo, Memo X

Menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023, Pemprov Jatim menggelar High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Gubernur dan Forkopimda Jawa Timur, di Hotel JW Marriot, Surabaya, Senin (20/02/2023). Salah satu yang menjadi perhatian dalam Rakor yang dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ini adalah pengendalian inflasi. Terutama soal masalah ketersediaan pangan khususnya beras di pasaran.

Rapat ini dihadiri seluruh Forkopimda Jatim, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim, serta kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, juga dari unsur TNI dan POLRI. Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

“Kenaikan harga beras belakangan ini terjadi menjadi salah satu penyebab inflasi di Jatim,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah



RAKOR - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menghadiri High Level Meeting dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Gubernur dan Forkopimda Jatim di Hotel JW Marriot, Surabaya, Senin (20/02/2023).

Indar Parawansa kepada Memo X, Senin (20/02/2023).

Selain itu, kata Khofifah inflasi juga dipicu akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan volatile food. Volatile food sendiri merupakan perubahan harga untuk menjaga stabilitas komoditas harga pangan.

“Ketika terjadi krisis, maka fungsi volatile food adalah me-

nekan harga bahan pangan meski hanya dalam jangkauan yang wajar. Kebijakan volatile food dilakukan agar menghindari kelangkaan pangan pada saat krisis terjadi,” ungkap Khofifah.

Namun demikian, Gubernur perempuan di Jatim ini menegaskan sebetulnya belakangan ini harga beras sudah mulai turun dibawah Harga Eceran Tertinggi

(HET) di beberapa daerah. Meski masih ada beberapa daerah dengan harga beras cukup tinggi yakni pada kisaran Rp12.000 per kilogram. “Sebetulnya kalau beras sudah mulai banyak di bawah HET. Yaitu Rp 8.800 per kilogram dengan HET Rp 9.450 per kilogram,” tegasnya.

Soal stok beras, Khofifah menandakan untuk stok beras di Jatim masih aman. Menurutnya, pada Minggu ketiga Februari ini akan panen 60.000 ton dan Minggu keempat Februari akan panen sebanyak 70.000 ton. “Kemudian pada bulan Maret 2023 nanti diprediksikan stok beras di Jatim akan mencapai 1.000.050 ton,” ungkapnya.

Sementara terkait stok beras akan lebih digencarkan lagi dengan operasi pasar. Selain itu, memastikan tidak akan ada kekosongan di pasaran. “Karena, 23 Maret akan masuk bulan Ramadan dan persiapan semua stok logistik dipastikan harus aman,” tandasnya. (par/wan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buka Seleksi untuk Isi Lima Jabatan di BUMD

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka seleksi untuk mengisi lima jabatan penting di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seleksi tersebut tercantum dalam pengumuman nomor 002/PAN-SEL-OBUMD-Kab.SDA/II-2023.

Ketua Panitia Seleksi (pansel) Andjar Surjadianto mengatakan, seleksi tersebut untuk mengisi kekosongan pada organ BUMD milik Sidoarjo. Kelima jabatan tersebut adalah Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perumda Delta Tirta, Dewan Pengawas Perumda Delta Tirta,

Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda), Direktur PT Aneka Usaha (Perseroda), dan Komisaris PT Aneka Usaha (Perseroda).

Andjar menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar seleksi tersebut. "Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk beberapa jabatan," katanya.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui selama proses seleksi. Tahap pertama adalah pendaftaran yang dimulai pada 20 Februari hingga 26 Februari.



Sekaligus di hari itu peserta juga ada wawancara teknis dengan panel,"

ANDJAR SURJADIANTO
Ketua Panitia Seleksi (pansel)

Kemudian panitia akan memeriksa kelengkapan administrasi peserta. Proses tersebut berlangsung hingga 28 Februari. Pada 2 Maret akan diumumkan siapa saja yang lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti tahapan Uji Kelayakan (UKK). Di dalamnya ada beberapa tes. Seperti tes tulis yang dilakukan pada 6 Maret dan psikotes pada 7 Maret.

Peserta juga diminta untuk membuat makalah sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Makalah tersebut dikumpulkan pada 8 hingga 9 Maret. Selanjutnya mereka juga akan mempresentasikan makalahnya pada 13 hingga 14 Maret.

"Sekaligus di hari itu peserta juga ada wawancara teknis dengan panel," ujarnya.

Hasil dari presentasi dan wawancara tersebut selanjutnya diumumkan pada 16 Maret. Di hari yang sama, pansel juga melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Kemudian bupati akan mewawancarai peserta yang lolos

tahap UKK. Hal itu untuk mengetahui secara langsung apakah visi dan misi peserta sejalan dengan rencana pembangunan Pemkab Sidoarjo. Tahap akhir adalah pengumuman hasil seleksi yang rencananya akan dilaksanakan pada 22 Maret.

Andjar menjelaskan, seleksi ini dilakukan sebagai upaya untuk menyehatkan BUMD Sidoarjo. Dengan pengisian jabatan kosong tersebut diharapkan BUMD bisa berjalan maksimal. Termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (nis/vga)



Kades Diberi Pendampingan Kelola Dana Desa

Gus Muhdlor : Rentan Masalah Hukum

SIDOARJO - Edukasi dan pemahaman hukum terkait jabatan Kades, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP mengatakan jabatan Kepala Desa/Kades rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan. Hal itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa di hotel Aston Sidoarjo, Selasa, (21/2/23).

Oleh karenanya kata Bupati yang biasa disapa Gus Muhdlor, Kades perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah. Pengelolaan dana desa perlu mendapatkan pendampingan Aparat Penegak Hukum/APH. Hal itu penting diberikan agar dana desa yang digunakan tidak bermasalah. Sehingga tidak ada lagi Kades yang terjerat hukum terkait penggunaan dana desa.

"Kegiatan ini menjadi angin baru bagi perbaikan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Gus Muhdlor mengatakan kesalahan administrasi menjadi salah

satu faktor bermasalahnya penggunaan dana desa. Untuk itu edukasi melalui sosialisasi seperti ini penting dilakukan. Apalagi saat ini dana desa yang diterima Kabupaten Sidoarjo cukup besar. Jumlahnya Rp. 315 milyar yang dibagikan kepada 322 desa yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo.

"Teman-teman ini (Kades) butuh atensi dan edukasi termasuk dari BPK Provinsi," sampainya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi sendiri mengatakan ada beberapa permasalahan umum terkait pengelolaan dana desa yang sering ditemuinya. Di antaranya penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan dana desa. Jika itu tidak dilakukan akan berdampak pada permasalahan hukum. Selain itu pertanggung jawaban penggunaan dana desa yang tidak lengkap. Atau juga pelaporan penggunaan dana desa yang tidak seragam.

"Peraturan penggunaan dana desa yang belum lengkap terkait standar biaya, penggunaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan perkembangan desa dalam peren-



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sosialisasi optimalisasi peran dan tugas fungsi BPK dan DPR di hotel Aston Sidoarjo Selasa (21/2/23)

canaan serta mekanisme untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas juga menjadi salah satu permasalahan umum yang perlu diperbaiki," sampainya.

Indah Kurniawati anggota DPR RI Fraksi Partai PDI Perjuangan yang hadir mengatakan seluruh kegiatan yang

dibiayai dana desa harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang dilakukan secara terbuka. Semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Bila itu dilakukan, ia yakin dana desa akan sangat bermanfaat bagi pembangunan.

"Bila kita semua komitmen, kita

semua meningkatkan wawasan dan kemampuan kita dalam pengelolaan dana desa, kita mampu melakukan komunikasi yang baik, serta mampu bersinergi dan berkolaborasi, saya yakin tidak ada dana yang tidak dapat digunakan secara efektif," jelasnya. #loe

DUTA



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil Bupati Sidoarjo Subandi (tiga kiri) bersama dengan pejabat setempat meninjau ke lokasi banjir.

Pemkab Sidoarjo Petakan Wilayah Banjir 3 Kecamatan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo memetakan wilayah banjir di tiga kecamatan setempat untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Senin (20/1), mengatakan, dirinya bersama dengan pejabat setempat melakukan pemetaan terkait wilayah banjir.

"Wilayah yang tergenang banjir ada di Kecamatan Tanggulangin, yaitu di Desa Kedung Banteng, Banjar Asri, Banjar Panji, Kalidawir dan Boro. Di Kecamatan Porong meliputi Desa Sawahan, Candi Pari dan Wunut, sementara di Kecamatan Candi ada Desa Sumorame," katanya usai meninjau wilayah banjir di tiga kecamatan tersebut.

Ia mengatakan, khusus Desa Boro dan Sumorame, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah banjir hingga air masuk pemukiman. "Banjir di dua desa ini akibat air sungai meluap. Dampak dari hujan dan naiknya air laut," katanya.

Sementara di wilayah desa lainnya, banjir terjadi akibat hujan tinggi karena wilayah-wilayah tersebut sudah menjadi langganan banjir karena lokasi yang rendah.

"Untuk wilayah langganan banjir yang ada di Desa Sumorame, Kecamatan Candi akan dilakukan kajian terkait banjir yang merendam Sidoarjo bersama organisasi perangkat daerah," ujarnya.

Ia mengatakan, banjir yang datang di setiap musim hujan tersebut menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi keluhan masyarakat.

"Pengkukuran kembali jalan raya yang terendam banjir menjadi salah satu solusi sementara. Selain itu, normalisasi sungai di setiap desa yang menjadi langganan banjir juga perlu dilakukan pemerintah terkait penanggulangan banjir di Sidoarjo," ucapnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Dwijo Prawito mengatakan, dari tiga kecamatan yang ada di Sidoarjo setidaknya ada delapan desa yang menjadi langganan dan terendam banjir.

"Daerah yang terendam dan menjadi langganan banjir nantinya akan dilakukan pendataan kepada warga yang terdampak. Tak hanya itu, penanganan terkait sanitasi dan lain sebagainya juga tetap diberikan untuk warga yang masuk dalam kawasan terdampak," kata dia. (ant/rd)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wakil Rakyat Dukung Frontage Road

Delta Sari-Lingkar Timur Tuntas Maret

Sidoarjo, Memorandum

Progres pembangunan frontage road semakin terlihat. Segmen demi segmen terus disebut pembangunannya. Seperti pengerjaan frontage road segmen Delta Sari-Lingkar Timur.

Ditargetkan pertengahan bulan Maret segmen tersebut selesai pengerjaannya. Dengan begitu frontage road segmen tersebut akan dapat dilulus kemudian.

Progres pembangunan frontage road sendiri terus dipantau Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Pantiaannya tidak hanya lewat laporan dinas terkait. Namun juga datang langsung ke lokasi untuk melihat pengerjaannya.

Seperti yang dilakukan Selasa (14/2) pagi. Dengan menggunakan motor, ia bersama beberapa kepala dinas terkait melakukan sidak mengecek pengerjaan frontage road mulai ruas Waru sampai Buduran.

"Saya cek ini sudah on progres, akan selesai plus di 18 Maret (frontage road) segmen Delta Sari-Lingkar Timur, tinggal pernik-pernik kecil terutama masalah utilitas yang masih ada di tengah-tengah seperti tiang listrik yang harus dipindah," ujar bupati usai sidak.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor—itu mengatakan, bahwa secara keseluruhan progres pembangunan frontage road Waru-Buduran berjalan dengan baik mulai dari Aloha Waru sampai Delta Sari juga sudah tersambung. Meski sementara ini masih terputus oleh pengerjaan fly over Aloha.

"Sementara sudah nyambung (frontage road) Aloha Waru sampai Delta Sari ini nanti di tanggal 18 Maret," ujarnya.

Selanjutnya, Gus Muhdlor



Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Bambang Riyoko



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H. Suyarno



Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H. Anang Siwandoko

bersama jajarannya akan memastikan pembangunannya terus berjalan. Di tahun 2023 ini, pembangunan frontage road mulai Waru sampai Aloha diharapkan dapat selesai.

Meski ada kendala pada lahan makam yang perlu dipindahkan. Namun ia pastikan sudah ada kesepakatan pemindahannya. Bahkan beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemindahan beberapa jenazah di lahan pengganti. Namun tidak dilanjutkan dikarenakan hujan.

"Tugasnya bupati beserta jajaran memastikan di tahun 2023 antara Waru sampai dengan Aloha nyambung dulu. Waru sampai Aloha ini kendalanya ada sedikit di makam, namun Allah segera tuntas, sudah ada koordinasi dengan pak Kadus Waru dan camat," paparnya.

Gus Muhdlor juga pastikan ditahun 2024 ini, pembangunan frontage road Waru-Buduran akan selesai keseluruhannya. Mulai dari Korem 064 Bhaskara Jaya sampai Delta Sari maupun dari Delta Sari sampai Lingkar Timur

serta dari Lingkar Timur sampai Buduran. Ia yakin dapat selesai tahun depan meski masih ada kendala pada pengadaan fly over Aloha.

"Kami juga tidak ingin berjanji-janji namun insya Allah 2024 tuntas semua," jentrehnya.

Lebih lanjut Gus Muhdlor mengatakan pembangunannya

frontage road juga akan dilakukan di sisi barat jalan protokol Pembangunan frontage road di dua sisi jalan itu sudah menjadi pemikirannya. Bahkan langkah itu sudah dimulainya. Ia sudah mengajukan tukar guling antara RS Mitra Keluarga dengan Pemkab Sidoarjo. Begitu pula dengan lahan milik BKN Kantor Regional II Surabaya. Sudah ada koordinasi. Namun fokus pembangunannya setelah pembangunan frontage road sisi Timur tuntas. "Kalau frontage road di sisi Timur selesai, maka sudah harus dipikirkan di Barat, itu yang harus kita pikirkan dan menjadi grand desain Pemkab Sidoarjo sekian tahun ke depan," tandasnya.

Target pemkab menuntaskan frontage road Delta Sari Waru hingga Lingkar Timur pada Maret 2023 ini mendapat dukungan dari kalangan wakil rakyat kota Delta. Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, misalnya, dalam beberapa kesempatan politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan dewan akan selalu mendukung pemkab yang mengorbit pembangunan. "Pembangunan itu untuk rakyat dan kabupaten tercinta. Jadi pasti kita dukung lah karena nanti yang menikmati juga rakyat kita," ujar H. Usman.

Ial senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H. Bambang Riyoko. Dalam beberapa kesempatan, Perjuangan itu mengatakan, pembangunan jalan seperti frontage road jelas bakal didukung penuh oleh dewan. Sebab setelah frontage road tuntas dan menyambung frontage road Surabaya, warga Sidoarjo bisa memilih jalur alternatif. Ketika ruas utama Surabaya-Sidoarjo mulai Waru hingga Buduran padat, warga bisa memilih frontage road.

Dengan kata lain, menurut H. Bambang Riyoko, kepadatan di ruas Surabaya-Sidoarjo bakal terurai dengan dioperasionalkannya frontage road. Karena itulah, semakin disebut pembangunan frontage road, dewan lokal mendukungnya. "Selama ini jalan yang ada tidak bisa menampung jumlah kendaraan yang tiap hari terus bertambah. Dari tahun ke tahun ruas utama Surabaya-Waru selalu padat, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Nah dengan dioperasionalkannya frontage road, paling tidak kepadatan menjadi terurai. Ini yang menikmati masyarakat," jelas H. Bambang Riyoko.

Komentar tidak bisa jauh di lontarkan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H. Suyarno. Politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan asal Prambon itu berkali-kali juga menegaskan komisinya mendukung



Bupati Ahmad Muhdlor berdiskusi menanyakan progres proyek jalan.



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sidak proyek frontage road dengan mengendarai motor trail.

penuh pembangunan infrastruktur. Sebab cukup banyak jalan di Sidoarjo yang perlu dibangun dan dibenahi. Salah satunya penuntasan frontage road yang sempat tersendat. "Kalau sekarang diheut, pasti kita dukung. Akan kita kawal agar tepat waktu dan kualitasnya bagus," ujar H. Suyarno.

H. Suyarno juga menyebutkan, sejak awal pembangunan frontage road, pihaknya sudah mengawal lahan dan pembangunannya. Ketika ada kendala, pihaknya juga kerap menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dan turun ke lokasi. "Intinya kita mendukung pembangunan frontage road dan

memdesak agar segera dituntaskan sehingga bisa dinikmati masyarakat," jelas H. Suyarno.

Pun demikian dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H. Anang Siwandoko. Politis Partai Gerindra yang berangkat dari profesi kontraktor ini bahkan menyebut pihaknya kerap mendorong pemkab agar segera menuntaskan pembangunan frontage road untuk menguras kemacetan jalur utama Surabaya-Sidoarjo. "Ketika ada kendala, kita panggil OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk dicarikan solusinya mengapa bertahun-tahun tidak segera tuntas pembangunan frontage road" ujar H. Anang Siwandoko kepada koran itu

dalam beberapa kesempatan.

H. Anang Siwandoko sempat mengingatkan GPD bahwa dana untuk pembangunan frontage road itu ada. Sidoarjo termasuk kabupaten kaya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) cukup tinggi. Kalau Surabaya bisa dengan cepit menuntaskan frontage road, kenapa Sidoarjo tidak. "Kami sudah kita mendukung penuh penuntasan pembangunan frontage road. Kita mengawal pembangunan frontage road mulai awal hingga mendekati akhir ini. Kita obrol-obrol agar segera dituntaskan biar bisa dinikmati masyarakat," tandas H. Anang Siwandoko yang dikawal oleh DPRD Sidoarjo tadi hari/pok/india



MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PARIWARA SEPUTAR KEGIATAN DPRD SIDOARJO



Kelompok H. Usman Bambang Rhyko SE Kayan SH Dir Emir Pendas STMM



MEDIASI - Kepala Kejaksaan Sidoarjo, Ahmad Muhdlor bersama Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman dan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto melakukan mediasi antara Dishub Pemkab Sidoarjo dan PT ISS terkait perjanjian kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan, Kamis (09/02/2023) lalu.

Ada Kesepakatan Baru, DPRD Sidoarjo Fasilitasi Mediasi Kebuntuan Kerjasama Parkir Antara Dishub dan PT ISS

Sidoarjo, Memo X

Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo terus berupaya memediasi kebutuhan kerjasama antara Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo dan PT Indonesia Sarana Service (ISS) KSO soal pengelolaan parkir di wilayah Sidoarjo. Sejumlah mediasi itu, tidak hanya dilaksanakan melalui hearing yang digelar 25 Januari 2023 di ruang transit DPRD Sidoarjo, akan tetapi juga digelar hingga media melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo pada 9 Februari 2023 kemarin.

Berbagai upaya media ini diberikan sebagai solusi agar ada jalan keluar mengenai kebutuhan proses kerjasama dalam pengelolaan parkir itu. Bahkan dalam media terakhir di ruang Aula Kejari Sidoarjo yang dihadiri Kepala Kejari Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman dan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto serta Kepala Dishub Pemkab Sidoarjo, Benny Airlangga dan PT ISS yang diwakili Ir Sugiono, Dian Sutjipto serta penasehat hukum, Djauhari SH mendapatkan beberapa kesepakatan baru. Beberapa kesepakatan baru yang sudah ditandatangani para pihak itu, diantaranya pertama kesepakatan bagi hasil 60 persen PT ISS dan 40 persen Pemda dengan kemungkinan dilakukan adendum

setiap pembaruan Surat Perjanjian Kerjasama. Kedua kewajiban setor harus segera disetorkan PT ISS ke Kasda dan ketiga kalau memang Pemda sepakat dengan sistem yang baru ini agar segera dilakukan adendum.

"Kami sebagai pimpinan dewan, berupaya agar kebutuhan kerjasama pengelolaan parkir ini bisa menemukan solusi. Kami melaksanakan mediasi berkali-kali mempertemukan pihak Dishub dan PT ISS ini, karena kerjasama ini sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) mendapat persetujuan DPRD Sidoarjo," ujar Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman kepada Memo X, Selasa (21/02/2023).

Lebih jauh mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo ini berharap tidak ada persoalan yang menyebabkan kebutuhan kerjasama ini tidak ada solusinya. Karena itu, dirinya tidak hanya memediasi kedua belah pihak baik Dishub Pemkab Sidoarjo maupun PT ISS hanya melalui hearing di DPRD Sidoarjo. Pihaknya juga melibatkan Kejari Sidoarjo sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melaksanakan mediasi dan menyelesaikan kebutuhan kerjasama yang sudah berjalan ini.

"Kami sebagai mitra Pemkab Sidoarjo hanya berupaya melaksanakan mediasi itu agar ada jalan keluar bagi kedua belah



pihak. Kami punya tanggung jawab sosial sebagai mitra Pemkab Sidoarjo sekaligus yang ikut menyetujui kerjasama itu sebelum PKS dilaksanakan antara Dishub Pemkab Sidoarjo dan PT ISS," ungkap Usman yang juga politisi senior PKB ini.

Kendati demikian berbagai upaya media itu, semuanya akan dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak. Yakni Dishub Pemkab Sidoarjo dan PT ISS. "Karena keputusan akhirnya tetap ada ditangan kedua belah pihak. Sekali lagi kami hanya memfasilitasi agar segera ada solusi terbaik

bagi pengelolaan parkir di Sidoarjo dan tentunya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir bisa meningkat (naik)," tegas Abah Usman.

Hai yang senada disampaikan Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto. Menurutnya, Komisi B DPRD Sidoarjo akan segera memanggil tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pemkab serta pimpinan PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) untuk menanyakan tindak lanjut hasil mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo kemarin.

"Kami memanggil TKKSD dan Dishub Pemkab Sidoarjo serta PT ISS ini untuk memastikan konsep dan teknis pelaksanaannya sekaligus detailnya. Termasuk soal nilai kesepakatannya bergantung kedua belah pihak," papar politisi senior Genindra Sidoarjo ini.

Dalam media terakhir di Kejari Sidoarjo, kata Bambang pihak Pemkab Sidoarjo diwakili Kepala Dishub, Benny Airlangga dan staf Bagian Hukum. Mereka akan segera melaporkan hasil mediasi itu ke Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.

"Soal keputusan hubungan kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan tempat khusus antara Dishub dan PT ISS itu bergantung keputusan Bupati Sidoarjo," jelasnya.

Bagi Bambang saat ini, DPRD Sidoarjo hanya berupaya persoalan kerjasama pengelolaan parkir ini harus segera dicarikan solusi terbaiknya.

"Kami hanya berupaya mencari solusi terbaik bagi semua. Tujuannya agar Pemkab Sidoarjo tidak kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir yang nilainya cukup besar," pungkasnya.

Sementara penasehat hukum PT ISS KSO, Djauhari berharap usai mediasi dan ada tiga kesepakatan baru itu, meminta

Kepada Dishub dan Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo untuk segera menyiapkan nomor rekening sebagai penampung untuk menerima setoran bagi hasil dari PT ISS KSO berdasarkan yang diperoleh sesuai prosentase yang di sepakati kedua belah pihak. "Kalau nomor rekening sudah disiapkan maka PT ISS akan segera menyetorkan dana bagi hasil pengelolaan parkir itu," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, hubungan kerjasama pengelolaan tempat parkir mengalami kebuntuan. Hal ini dipicu jumlah titik parkir yang diserahkan Pemkab Sidoarjo ke PT ISS KSO tidak sesuai dengan PKS. Jika dalam PKS ada 359 titik parkir yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada PT ISS. Kenyataannya, berdasarkan hasil kajian kedua belah pihak melibatkan konsultan dari Universitas Brawijaya Malang, hanya ditemukan 87 titik parkir potensial yang bisa dikerjasamakan. Dengan begitu nilai pendapatan turun dari Rp 32 miliar menjadi Rp 12 miliar. (adv/ian)





Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor saat menghadiri HLM

Bupati Hadiri High Level Meeting Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur

Sidoarjo, Pojok Kiri

Mendekati Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Pemprov Jatim menggelar High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jawa Timur di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin 20 Februari 2023. Salah satu yang menjadi perhatian dalam Rakor pengendalian inflasi ini adalah masalah ketersediaan pangan khususnya beras.

Dalam rapat ini dihadiri seluruh Forkopimda se-Jatim, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim, serta kepala Badan Pusat Statistik Jatim, juga dari unsur TNI - POLRI. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam paparannya, peningkatan harga beras yang belakangan terjadi menjadi salah satu penyebab inflasi. Selain itu, inflasi juga ditengarai akibat kenaikan harga BBM dan volatile food. Volatile food sendiri merupakan perubahan harga untuk menjaga stabilitas komoditas harga pangan. Ketika terjadi krisis maka fungsi volatile food adalah menekan harga bahan pangan walau hanya dalam jangkauan yang wajar.

"Kebijakan volatile food dilakukan agar

menghindari kelangkaan pangan pada saat krisis terjadi," ujar Khofifah.

Namun demikian, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sebetulnya belakangan ini harga beras sudah mulai turun dan dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa daerah. Meskipun masih ada beberapa daerah dengan harga beras cukup tinggi, yakni dikisaran Rp12.000/Kg.

"Sebetulnya kalau beras sudah mulai banyak di bawah HET, yaitu Rp. 8.800 sedangkan HET-nya Rp. 9.450," tegasnya.

Terkait dengan stok beras, Gubernur Khofifah menandakan bahwa untuk stok di Jatim masih aman. Ia mengungkapkan pada Minggu ketiga Februari ini akan panen 60 ribu ton, dan Minggu keempat Februari akan panen sebanyak 70 ribu ton. Kemudian pada bulan Maret nanti diprediksikan stok beras di Jatim akan mencapai 1.000.050 ton.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan stok beras akan lebih digencarkan lagi untuk memastikan tidak akan ada kekosongan di pasar. "Karena, 23 Maret akan masuk bulan Ramadhan, dan persiapan semua stok logistik kita pastikan aman," ujarnya (Khol/Dy)

Gus Muhdlor: Cegah Masalah Hukum, Pengelolaan Dana Desa Perlu Mendapatkan Pendampingan APH

KOTA-Jabatan kepala desa (kades) dinilai rentan terhadap masalah hukum. Salah satu penyebabnya kurangnya edukasi terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan. Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menghadiri sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, Selasa (21/2).

Gus Muhdlor sapaan bupati mengatakan, kades perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah. Pengelolaan dana desa perlu mendapatkan pendampingan Aparat Penegak Hukum (APH). Hal itu penting diberikan agar dana desa

yang digunakan tidak bermasalah. Sehingga tidak ada lagi Kades yang terjerat hukum terkait penggunaan dana desa.

"Kegiatan ini menjadi angin baru bagi perbaikan pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Menurutnya, kesalahan administrasi menjadi salah satu faktor bermasalahnya penggunaan dana desa. Untuk itu edukasi melalui sosialisasi seperti ini penting dilakukan. Apalagi saat ini dana desa yang diterima Kabupaten Sidoarjo cukup besar. Jumlahnya Rp 315 miliar yang dibagikan kepada 322 desa yang tersebar di Sidoarjo.

● Ke Halaman 10



Ahmad Muhdlor

Gus Muhdlor: Cegah Masalah...

"Teman-teman kades butuh atensi dan edukasi termasuk dari BPK Provinsi," ucapnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi mengatakan, ada beberapa permasalahan umum terkait pengelolaan dana desa yang sering ditemuinya. Di antaranya penatausahaan aset desa yang diperoleh dari penggunaan dana desa. Jika itu tidak dilakukan akan berdampak pada permasalahan hukum. Selain itu pertanggung jawaban penggunaan dana desa yang tidak lengkap. Atau juga pelaporan penggunaan dana desa yang tidak seragam.

"Peraturan penggunaan dana desa yang belum lengkap terkait standar biaya, penggunaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan perkembangan desa dalam perencanaan serta mekanisme untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas juga menjadi salah satu permasalahan umum yang perlu diperbaiki," jelasnya. (far/vga)